

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1. Sejarah Singkat Jawa Tengah

Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (*gewesten*) yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan (*vorstenland*) yang berdiri sendiri dan terdiri dari dua wilayah, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, sebagaimana Yogyakarta. Masing-masing *gewest* terdiri atas kabupaten-kabupaten. Waktu itu Pati *Gewest* juga meliputi *Regentschap* Tuban dan Bojonegoro.

Setelah diberlakukannya *Decentralisatie Besluit* tahun 1905, *gewesten* diberi otonomi dan dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga dibentuk *gemeente* (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang.

Sejak tahun 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (*Provinciale Raad*). Provinsi terdiri atas beberapa karesidenan (*residentie*), yang meliputi beberapa kabupaten (*regentschap*), dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan (*district*). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 karesidenan, yaitu: Pekalongan, Pati, Semarang, Banyumas, dan Kedu.

Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945 Pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran; dan dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950 melalui Undang-undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Penetapan Undang-undang tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan.

Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten.

Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen).

pulau terpisah dari Jawa, yang akhirnya menyatu karena terjadi endapan aluvial dari sungai-sungai yang mengalir. Kota Demak semasa Kesultanan Demak (abad ke-16 Masehi) berada di tepi laut dan menjadi tempat berlabuhnya kapal. Proses sedimentasi ini sampai sekarang masih berlangsung di pantai Semarang.

Di selatan kawasan tersebut terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng, yakni pegunungan kapur yang membentang dari sebelah timur Semarang mulai dari ujung Barat Daya Kota Pati kemudian ke timur hingga perbatasan Lamongan dan Bojonegoro (Jawa Timur).

Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Rangkaian Pegunungan Serayu Utara membentuk rantai pegunungan yang menghubungkan rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan Pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian pegunungan ini sekitar 30–50 km; di ujung baratnya terdapat Gunung Slamet dan bagian timur merupakan Dataran Tinggi Dieng dengan puncak-puncaknya Gunung Prahur dan Gunung Ungaran. Antara rangkaian Pegunungan Serayu Utara dan Pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh Depresi Serayu yang membentang dari Majenang (Kabupaten Cilacap), Purwokerto, hingga Wonosobo. Sebelah timur depresi ini terdapat gunung berapi Sindoro dan Sumbing, dan sebelah timurnya lagi (kawasan Magelang dan Temanggung) merupakan lanjutan depresi yang membatasi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu.

Pegunungan Serayu Selatan merupakan bagian dari Cekungan Jawa Tengah Selatan yang terletak di bagian selatan provinsi Jawa Tengah. Mandala ini merupakan geoantiklin yang membentang dari barat ke timur sepanjang 100

kilometer dan terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh lembah Jatilawang yaitu bagian barat dan timur. Bagian barat dibentuk oleh Gunung Kabanaran (360 m) dan bisa dideskripsikan mempunyai elevasi yang sama dengan Zona Depresi Bandung di Jawa Barat ataupun sebagai elemen struktural baru di Jawa Tengah. Bagian ini dipisahkan dari Zona Bogor oleh Depresi Majenang.

Bagian timur dibangun oleh antiklin Ajibarang (narrow anticline) yang dipotong oleh aliran Sungai Serayu. Pada timur Banyumas, antiklin tersebut berkembang menjadi antiklinorium dengan lebar mencapai 30 km pada daerah Lukulo (selatan Banjarnegara-Midangan 1043 m) atau sering disebut tinggian Kebumen (Kebumen High). Pada bagian paling ujung timur Mandala Pegunungan Serayu Selatan dibentuk oleh kubah Pegunungan Kulonprogo (1022 m), yang terletak di antara Purworejo dan Sungai Progo.

Kawasan pantai selatan Jawa Tengah juga memiliki dataran rendah yang sempit, dengan lebar 10–25 km. Selain itu terdapat Kawasan Karst Gombang Selatan. Perbukitan yang landai membentang sejajar dengan pantai, dari Yogyakarta hingga Cilacap. Sebelah timur Yogyakarta merupakan daerah pegunungan kapur yang membentang hingga pantai selatan Jawa Timur.

2.2.2. Kondisi Hidrologi

Sungai-sungai yang bermuara di Laut Jawa di antaranya adalah Bengawan Silugonggo, Kali Pemali, Kali Comal, dan Kali Bodri. Sedang sungai-sungai yang bermuara di Samudra Hindia di antaranya adalah Kali Serayu, Sungai Bogowonto, Sungai Luk Ulo dan Kali Progo. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di

Pulau Jawa (572 km); memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini mengalir ke utara, melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya).

Di antara waduk-waduk (Danau) yang utama di Jawa Tengah adalah Danau Gunung Rowo (Kabupaten Pati), Waduk Gajahmungkur (Kabupaten Wonogiri), Waduk Kedungombo (Kabupaten Boyolali dan Sragen), Danau Rawa Pening (Kabupaten Semarang), Waduk Cacaban (Kabupaten Tegal), Waduk Malahayu (Kabupaten Brebes), Waduk Wadaslintang (perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo), Waduk Gembong (Kabupaten Pati), Waduk Sempor (Kabupaten Kebumen) dan Waduk Mrica (Kabupaten Banjarnegara).

2.3. Kondisi Demografi

2.3.1. Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sensus 2015 adalah 35.557.249 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (2,342 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (2,227 juta jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,953 juta jiwa).

Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), daerah Salatiga Raya (termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengaran dan Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,45% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun).

Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%).

2.3.2. Suku dan Bahasa

Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah Suku Jawa. Jawa Tengah dikenal sebagai *pusat budaya Jawa*, di mana di kota Surakarta dan Yogyakarta terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini.

Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di kawasan perkotaan meskipun di daerah pedesaan juga ditemukan. Pada umumnya mereka bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Komunitas Tionghoa sudah berbaur dengan Suku Jawa, dan banyak di antara mereka yang menggunakan Bahasa Jawa dengan logat yang kental sehari-harinya. Pengaruh kental bisa kita rasakan saat berada di kota Semarang serta kota Lasem yang berada di ujung timur laut Jawa Tengah, bahkan Lasem dijuluki *Le Petit Chinois* atau Kota Tiongkok Kecil.

Selain itu di beberapa kota-kota besar di Jawa Tengah ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia. Mirip dengan komunitas Tionghoa, mereka biasanya bergerak di bidang perdagangan dan jasa.

Di daerah perbatasan dengan Jawa Barat terdapat pula orang Sunda yang sarat akan budaya Sunda, terutama di wilayah Cilacap, Brebes, dan Banyumas. Di pedalaman Blora (perbatasan dengan provinsi Jawa Timur) terdapat komunitas Samin yang terisolir, yang kasusnya hampir sama dengan orang Kanekes di Banten.

Meskipun Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, umumnya sebagian besar menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa Dialek Solo-Jogja atau Mataram dianggap sebagai *Bahasa Jawa Standar*.

Di samping itu terdapat sejumlah dialek Bahasa Jawa; namun secara umum terdiri dari dua, yakni *kulonan* dan *timuran*. *Kulonan* dituturkan di bagian barat Jawa Tengah, terdiri atas Dialek Banyumasan dan Dialek Tegal; dialek ini memiliki pengucapan yang cukup berbeda dengan *Bahasa Jawa Standar*. Sedang *Timuran* dituturkan di bagian timur Jawa Tengah, di antaranya terdiri atas Dialek Mataram (Solo-Jogja), Dialek Semarang, dan Dialek Pati. Di antara perbatasan kedua dialek tersebut, dituturkan Bahasa Jawa dengan campuran kedua dialek; daerah tersebut di antaranya adalah Pekalongan dan Kedu.

Di wilayah-wilayah berpopulasi Sunda, yaitu di kabupaten Brebes bagian selatan, dan kabupaten Cilacap utara sekitar kecamatan Dayeuhluhur, orang Sunda masih menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-harinya.

2.3.3. Perekonomian

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja

terserap. Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan selatan. Daerah Rembang, Blora, Grobogan merupakan penghasil kayu jati. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen. Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota Batik yang kental dengan nuansa klasik.

Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora (perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah) terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan, dan kawasan ini sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak.

2.4. Pemilu Tahun 2009 di Jawa Tengah

2.4.1. Pemilu dan Partai Peserta Pemilu Tahun 2009

Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2009 atau Pileg 2009) diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009 (sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April, namun kemudian diundur).

Terdapat 38 partai memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam pemilu 2009. Partai Demokrat memenangkan suara terbanyak, diikuti dengan Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan 4 partai politik lagi sebagai peserta Pemilu 2009. Berikut daftar 44 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 beserta nomor urutnya.

Nomor Urut	Nama Partai
1	Partai Hati Nurani Rakyat
2	Partai Karya Peduli Bangsa
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
4	Partai Peduli Rakyat Nasional
5	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	Partai Barisan Nasional

7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Amanat Nasional
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru
11	Partai Kedaulatan
12	Partai Persatuan Daerah
13	Partai Kebangkitan Bangsa
14	Partai Pemuda Indonesia
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
16	Partai Demokrasi Pembaruan
17	Partai Karya Perjuangan
18	Partai Matahari Bangsa
19	Partai Penegak Demokrasi Bangsa
20	Partai Demokrasi Kebangsaan
21	Partai Republika Nusantara
22	Partai Pelopor
23	Partai Golongan Karya
24	Partai Persatuan Pembangunan
25	Partai Damai Sejahtera
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
27	Partai Bulan Bintang
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
29	Partai Bintang Reformasi
30	Partai Patriot
31	Partai Demokrat

32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia
33	Partai Indonesia Sejahtera
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama
41	Partai Merdeka
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
43	Partai Sarikat Indonesia
44	Partai Buruh

Tabel 2.1. Partai Peserta Pemilu Tahun 2009

2.4.2. Daerah Pemilihan di Jawa Tengah pada Tahun 2009

Pada Pemilu 2009 di Jawa Tengah menetapkan Jawa Tengah terbagi menjadi 10 daerah pemilihan. Berikut daftar 10 daerah pemilihan beserta pembagian Kabupaten/Kota.

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
(1)	(2)	(3)	(4)
	DP JAWA TENGAH 1 Meliputi Kab/Kota :		
1	SEMARANG	968.654	10
2	KENDAL	1.050.843	
3	KOTA SALATIGA	166.466	
4	KOTA SEMARANG	1.751.453	
	DP JAWA TENGAH 2 Meliputi Kab/Kota :		
5	KUDUS	730.932	9
6	JEPARA	1.043.573	
7	DEMAK	1.001.965	
	DP JAWA TENGAH 3 Meliputi Kab/Kota :		
8	GROBOGAN	1.380.491	12
9	BLORA	951.559	
10	REMBANG	547.708	
11	PATI	1.260.203	
	DP JAWA TENGAH 4 Meliputi		

	Kab/Kota :		
12	WONOGIRI	1.186.556	8
13	KARANGANYAR	844.943	
14	SRAGEN	893.980	
	DP JAWA TENGAH 5 Meliputi Kab/Kota :		
15	BOYOLALI	936.772	10
16	KLATEN	1.458.794	
17	SUKOHARJO	830.433	
18	KOTA SURAKARTA	460.005	
	DP JAWA TENGAH 6 Meliputi Kab/Kota :		
19	PURWOREJO	909.400	11
20	WONOSOBO	812.881	
21	MAGELANG	1.185.989	
22	TEMANGGUNG	768.075	
23	KOTA MAGELANG	127.784	
	DP JAWA TENGAH 7 Meliputi Kab/Kota :		
24	PURBALINGGA	916.575	9
25	BANJARNEGARA	1.009.005	
26	KEBUMEN	1.222.356	
	DP JAWA TENGAH 8 Meliputi Kab/Kota :		
27	CILACAP	1.860.240	10
28	BANYUMAS	1.746.971	
	DP JAWA TENGAH 9 Meliputi Kab/Kota :		
29	TEGAL	1.909.426	11
30	BREBES	1.907.284	
31	KOTA TEGAL	261.677	
	DP JAWA TENGAH 10 Meliputi Kab/Kota :		
32	BATANG	739.751	10
33	PEKALONGAN	938.715	
34	PEMALANG	1.343.927	
35	KOTA PEKALONGAN	275.069	
	JUMLAH	35.400.455	100

Tabel 2.2. Tabel Pembagian Daerah Pemilihan di Jawa Tengah Tahun 2009

2.5. Pemilu Tahun 2014 di Jawa Tengah

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.

Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah. Adapun kursi yang diperebutkan sebagai berikut:

Tingkat	Institusi	Kursi yang diperebutkan
Nasional	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	560
Nasional	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	132
Provinsi	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I (DPRD I)	2,112
Kabupaten/Kota	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II (DPRD II)	16,895
	Total	20,389

Tabel 2.3. Jumlah Kursi Legislatif yang Diperebutkan pada Pemilu 2014

Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.

2.5.1. Partai Peserta Pemilu Tahun 2014 di Jawa Tengah

Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014. Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual. Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014. Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif

2014. Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 beserta nomor urutnya.

Nomor Urut	Nama Partai
1	Partai NasDem
2	Partai Kebangkitan Bangsa
3	Partai Keadilan Sejahtera
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	Partai Golongan Karya
6	Partai Gerakan Indonesia Raya
7	Partai Demokrat
8	Partai Amanat Nasional
9	Partai Persatuan Pembangunan
10	Partai Hati Nurani Rakyat
14	Partai Bulan Bintang
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Tabel 2.4. Peserta Pemilu Tahun 2014

2.5.2. Daerah Pemilihan di Jawa Tengah pada Tahun 2014

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012, daerah pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan menjadi 10 daerah pemilihan. Berikut daftar 10 daerah pemilihan beserta pembagian Kabupaten/Kota.

NO	DAERAH PEMILIHAN	KAB / KOTA	JML PENDUDUK	JUMLAH KURSI Jml.Pddk/BPPd
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JAWA TENGAH - 1	KAB. SEMARANG	987.177	8
		KAB. KENDAL	948.493	
		KOTA SALATIGA	164.904	
		KOTA SEMARANG	1.488.035	
			3.588.609	
	JAWA TENGAH - 2	KAB. KUDUS	743.291	7
		KAB. JEPARA	1.137.608	
		KAB. DEMAK	1.064.475	
			2.945.374	
	JAWA TENGAH - 3	KAB. GROBOGAN	1.179.448	9
		KAB. BLORA	760.799	
		KAB. REMBANG	598.318	
		KAB. PATI	1.092.230	
			3.630.795	
	JAWA TENGAH - 4	KAB. WONOGIRI	842.708	7
		KAB. KARANGANYAR	744.965	
		KAB. SRAGEN	741.142	
			2.328.815	
	JAWA TENGAH - 5	KAB. BOYOLALI	932.814	8
		KAB. KLATEN	1.156.043	
		KAB. SUKOHARJO	740.366	
		KOTA SURAKARTA	528.716	
			3.357.939	
	JAWA TENGAH - 6	KAB. PURWOREJO	738.728	8
		KAB. WONOSOBO	810.323	

		KAB. MAGELANG	1.129.490	
		KAB. TEMANGGUNG	719.553	
		KOTA MAGELANG	118.208	
			3.516.302,00	
	JAWA TENGAH - 7	KAB. PURBALINGGA	907.526	7
		KAB. BANJARNEGARA	923.971	
		KAB. KEBUMEN	1.301.590	
			3.133.087	
	JAWA TENGAH - 8	KAB CILACAP	1.665.586	8
		KAB. BANYUMAS	1.551.076	
			3.216.662,00	
	JAWA TENGAH - 9	KAB. TEGAL	1.379.489	8
		KOTA TEGAL	254.450	
		KAB. BREBES	1.764.041	
			3.397.980	
	JAWA TENGAH - 10	KAB. BATANG	786.908	7
		KAB. PEKALONGAN	886.478	
		KAB. PEMALANG	1.493.454	
		KOTA PEKALONGAN	295.954	
			3.462.794	
JUMLAH			32.578.357	77

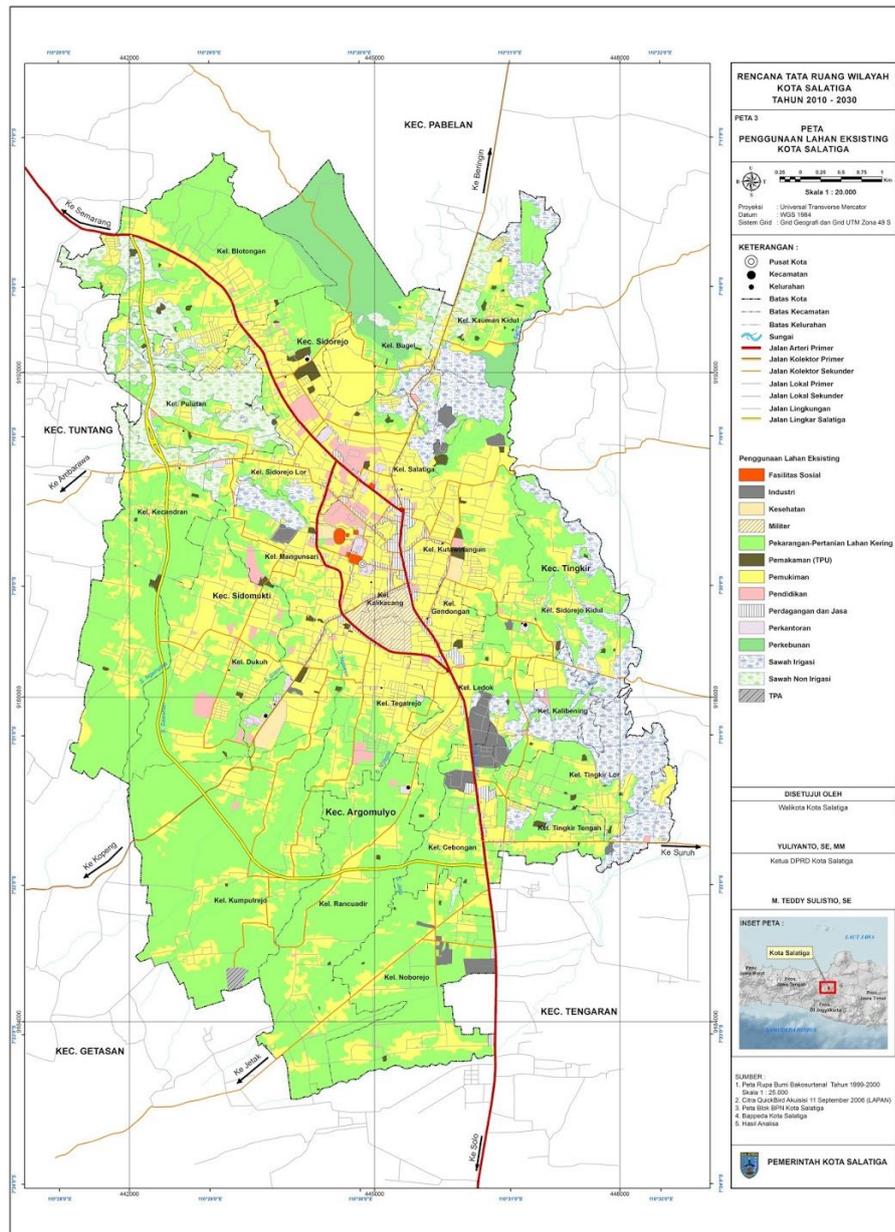
Tabel 2.5. Daerah Pemilihan di Jawa Tengah

2.5.3. Kota Salatiga

Sejarah singkat Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Letak Kota Salatiga berada

sekitar 49 kilometer di sebelah selatan Kabupaten Semarang dan sekitar 52 kilometer sebelah utara Kota Surakarta, serta berada di jalan Negara yang menghubungkan antara Semarang dengan Surakarta.



Gambar 2.2. Peta Salatiga

Ada beberapa sumber yang dijadikan dasar untuk mengungkapkan asal-usul Salatiga, yaitu yang berasal dari cerita rakyat, prasasti, maupun penelitian dan kajian yang cukup detail. Dari beberapa sumber tersebut Prasasti Plumpungan-lah yang dijadikan dasar asal-usul Kota Salatiga. Berdasarkan prasasti ini Hari Jadi Kota Salatiga dibakukan, yakni tanggal 24 Juli tahun 750 Masehi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Hari Jadi Kota Salatiga.

1. Prasasti Plumpungan

Cikal bakal lahirnya Salatiga tertulis dalam batu besar berjenis andesit berukuran panjang 170cm, lebar 160cm dengan garis lingkaran 5 meter yang selanjutnya disebut prasasti Plumpungan. Berdasarkan Prasasti yang berada di Dukuh Plumpungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo itu, maka Salatiga sudah ada sejak tahun 750 Masehi, yang ada pada saat itu merupakan wilayah Perdikan. Sejarawan yang sekaligus ahli Epigrafi Dr. J. G. de Casparis mengalihkkan tulisan tersebut secara lengkap yang selanjutnya disempurnakan oleh Prof. Dr. R. Ng Poerbatjaraka.

Prasasti yang diperkirakan dibuat pada Jumat, 24 Juli tahun 750 Masehi itu, ditulis oleh seorang Citraleka, yang sekarang dikenal dengan sebutan penulis atau pujangga, dibantu oleh sejumlah pendeta atau resi dan ditulis dalam bahasa Jawa kuno: "Srir Astu Swasti Prajabyah" yang berarti "Semoga Bahagia, Selamatlah Rakyat Sekalian". Sejarawan memperkirakan, bahwa masyarakat Hampra telah berjasa kepada Raja Bhanu yang merupakan seorang raja besar dan sangat memperhatikan rakyatnya, yang memiliki daerah kekuasaan meliputi sekitar

Salatiga, Kabupaten Semarang, Ambarawa, dan Kabupaten Boyolali. Penetapan di dalam prasasti itu merupakan titik tolak berdirinya daerah Hampra secara resmi sebagai daerah Perdikan dan dicatat dalam prasasti Plumpungan. Atas dasar catatan prasasti itulah dan dikuatkan dengan Perda No. 15 tahun 1995 maka ditetapkan Hari Jadi Kota Salatiga jatuh pada tanggal 24 Juli.

2. Zaman Penjajahan

Pada zaman penjajahan Belanda telah cukup jelas batas dan status Kota Salatiga, berdasarkan Staatblad 1917 No. 266 mulai 1 Juli 1917 didirikan Stood Gemente Salatiga yang daerahnya terdiri dari 8 desa. karena dukungan faktor geografis, udara sejuk dan letaknya sangat strategis, maka Salatiga cukup dikenal keindahannya di masa penjajahan Belanda.

3. Masa Kemerdekaan

Kota Salatiga adalah Staat Gemente yang dibentuk berdasarkan Staatblad 1923 No. 393 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Ditinjau dari segi administratif pemerintah dikaitkan dengan kondisi fisik dan fungsi Kotamadya Daerah Tingkat II, keberadaan Daerah Tingkat II Salatiga yang memiliki luas 17,82 km dengan 75% luasnya merupakan wilayah terbangun adalah tidak efektif.

Berdasarkan kesadaran bersama dan didorong kebutuhan areal pembangunan demi pengembangan daerah, muncul gagasan mengadakan

pemekaran wilayah yang dirintis tahun 1983. Kemudian terealisasi tahun 1992 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1992 yang menetapkan luas wilayah Salatiga menjadi 5.898 Ha dengan 4 Kecamatan yang terdiri dari 22 Kelurahan. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga berubah penyebutannya menjadi Kota Salatiga.

Kondisi Penduduk Kota Salatiga

Luas wilayah Kabupaten/Kota Salatiga adalah 56.781 km² dengan total 22 kelurahan. Kabupaten/Kota Salatiga mempunyai 1.044 RT dan total 199 RW. Pada awal tahun 2011 jumlah penduduk awal mencapai 176.722 orang dan pada akhir tahun mencapai 177.088 dengan akumulasi penduduk awal + lahir – mati + datang – pindah +WNA. Jumlah berdasarkan DP4 terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 65.834 orang dan jumlah penduduk perempuan mencapai 67.835 orang.

Pada awalnya Kotamadya Salatiga hanya terdiri dari satu kecamatan saja, yaitu Kecamatan Salatiga. Seiring dengan adanya pemekaran wilayah, Kota Salatiga mendapatkan beberapa tambahan daerah yang berasal dari Kabupaten Semarang. Hingga sekarang, secara administratif Kota Salatiga terdiri dari 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan.

Kecamatan dan Kelurahan tersebut meliputi:

1. Kecamatan Sidorejo, terdiri dari 6 kelurahan:

Blotongan, Sidorejo Lor, Salatiga, Bugel, Kauman Kidul, dan Pulutan

2. Kecamatan Tingkir, terdiri dari 7 kelurahan:

Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Gendongan, Sidorejo Kidul, Kalibening, Tingkir Lor, dan Tingkir Tengah

3. Kecamatan Argomulyo, terdiri dari 6 kelurahan:

Noborejo, Ledok, Tegalorejo, Kumpulrejo, Randuacir, dan Cebongan

4. Kecamatan Sidomukti, terdiri dari 4 kelurahan:

Kecandran, Dukuh, Mangunsari, dan Kalicacing

2.5.4. Kota Pekalongan

Sejarah Kota Pekalongan

Kota Pekalongan adalah salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan dengan laut Jawa di utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat dan Kabupaten Batang di timur. Kota Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Kota Pekalongan terletak di jalur pantai Utara Jawa yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kota Pekalongan berjarak 384 km di timur Jakarta dan 101 km sebelah barat Semarang. Kota Pekalongan mendapat julukan kota batik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak puluhan dan ratusan tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Batik telah menjadi nafas penghidupan masyarakat Pekalongan dan terbukti tetap dapat eksis dan tidak

menyerah pada perkembangan jaman, sekaligus menunjukkan keuletan dan keluwesan masyarakatnya untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran baru.

Meskipun tidak ada catatan resmi kapan batik mulai dikenal di Pekalongan, namun menurut perkiraan batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800. Bahkan menurut data yang tercatat di Deperindag, motif batik itu ada yang dibuat 1802, seperti motif pohon kecil berupa bahan baju.

Perkembangan yang signifikan diperkirakan terjadi setelah perang Diponegoro atau perang Jawa pada tahun 1825-1830. Terjadinya peperangan ini mendesak keluarga kraton Mataram serta para pengikutnya banyak yang meninggalkan daerah kerajaan terbesar ke Timur dan Barat. Di daerah-daerah baru itu mereka kemudian mengembangkan batik. Ke arah timur berkembang dan mempengaruhi batik yang ada di Mojokerto, Tulungagung, hingga menyebar ke Gresik, Surabaya, dan Madura. Sedangkan ke barat berkembang di banyumas, Kebumen, Tegal, Cirebon dan Pekalongan. Dengan adanya migrasi ini, maka batik Pekalongan yang telah berkembang sebelumnya semakin berkembang, Terutama di sekitar daerah pantai sehingga Pekalongan kota, Buaran, Pekajangan, dan Wonopringgo.

Perjumpaan masyarakat Pekalongan dengan berbagai bangsa seperti Cina, Belanda, Arab, India, Melayu dan Jepang pada zaman lampau telah mewarnai dinamika pada motif dan tata warna seni batik. Sehingga tumbuh beberapa jenis motif batik hasil pengaruh budaya dari berbagai bangsa tersebut yang kemudian sebagai motif khas dan menjadi identitas batik Pekalongan. Motif Jlamprang diilhami dari Negeri India dan Arab. Motif Encim dan Klenengan, dipengaruhi

oleh peranakan Cina. Motif Pagi-Sore dipengaruhi oleh orang Belanda, dan motif Hokokai tumbuh pesat pada masa pendudukan Jepang.

Kota Pekalongan memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah. Selain itu Kota Pekalongan banyak terdapat perusahaan pengolahan hasil laut, seperti ikan asin, ikan asap, tepung ikan, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik perusahaan bersekala besar maupun industri rumah tangga.

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya, karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Ada beberapa adat tradisi di Pekalongan yang tidak dijumpai di daerah lain semisal; syawalan, sedekah bumi, dan sebagainya. Syawalan adalah perayaan tujuh hari setelah Idul Fitri dan disemarakkan dengan pemotongan lopis raksasa untuk kemudian dibagi-bagikan kepada para pengunjung.

Nama Pekalongan sampai saat ini belum jelas asal-usulnya, belum ada prasasti atau dokumen lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ada hanya berupa cerita rakyat atau legenda. Dokumen tertua yang menyebut nama Pekalongan adalah Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (Gouvernements Besluit) Nomer 40 tahun 1931: nama Pekalongan diambil dari kata ‘Halong’ (dapat banyak) dan dibawah simbol kota tertulis ‘Pek-Alongan’.

Kemudian berdasarkan keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan tanggal 29 januari 1957 dan Tambahan Lembaran daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958, Serta persetujuan Pepekupeda Teritorium 4 dengan SK Nomer

KTPS-PPD/00351/II/1958 : nama Pekalongan berasal dari kata 'A-Pek-Halong-An' yang berarti pengangsalan (Pendapatan).

Pada masa VOC (abad XVII) dan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, sistem Pemerintahan oleh orang pribumi tetap dipertahankan. Dalam hal ini Belanda menentukan kebijakan dan prioritas, sedangkan penguasa pribumi ini oleh VOC diberi gelar Regant (Bupati). Pada masa ini, Jawa Tengah dan Jawa Timur dibagi menjadi 36 kabupaten Dengan sistem Pemerintahan Sentralistis

Pada abad XIX dilakukan pembaharuan pemerintahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang tahun 1954 yang membagi Jawa menjadi beberapa Gewest/Residensi. Setiap Gewest mencakup beberapa afdelling (setingkat kabupaten) yang dipimpin oleh asisten Residen, Distrik (Kawadenan) yang dipimpin oleh Controleur, dan Onderdistrict (Setingkat kecamatan) yang dipimpin Aspiran Controleur.

Di wilayah Jawa Tengah terdapat lima Gewest, Yaitu:

- Semarang gewest yang terdiri dari Semarang, Kendal, Demak, Kudus, Pati, Jepara dan Grobongan.
- Rembang Gewest yang terdiri dari Rembang, Blora, Tuban, dan Bojonegoro
- Kedu Gewest yang terdiri dari Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, dan Karanganyar.
- Banyumas Gewest yang terdiri dari Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga.
- Pekalongan gewest terdiri dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang.

Pada pertengahan abad XIX dikalangan kaum liberal Belanda muncul pemikiran etis-selanjutnya dikenal sebagai Politik Etis' yang menyerukan Program Desentralisasi Kekuasaan Administratif yang memberikan hak otonomi kepada setiap Karesidenan (Gewest) dan Kota Besar (Gumentee) serta pembentukan dewan-dewan daerah di wilayah administratif tersebut. Pemikiran kaum liberal ini ditanggapi oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dengan dikeluarkannya Staatbland Nomer 329 Tahun 1903 yang menjadi dasar hukum pemberian hak otonomi kepada setiap residensi (gewest); dan untuk Kota Pekalongan, hak otonomi ini diatur dalam Staatblaad Nomer 124 tahun 1906 tanggal 1 April 1906 tentang Decentralisatie Afzondering van Gelmiddelen voor de Hoofplaats Pekalongan uit de Algemene Geldmiddelen de dier Plaats yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menandatangani penyerahan kekuasaan kepada tentara Jepang. Jepang menghapus keberadaan dewan-dewan daerah, sedangkan Kabupaten dan Kotamadya diteruskan dan hanya menjalankan pemerintahan dekonsentrasi.

Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus oleh dwitunggal Soekarno-Hata di Jakarta, ditindaklanjuti rakyat Pekalongan dengan mengangkat senjata untuk merebut markas tentara Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945. Perjuangan ini berhasil, sehingga pada tanggal 7 Oktober 1945 Pekalongan bebas dari tentara Jepang.

Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan.

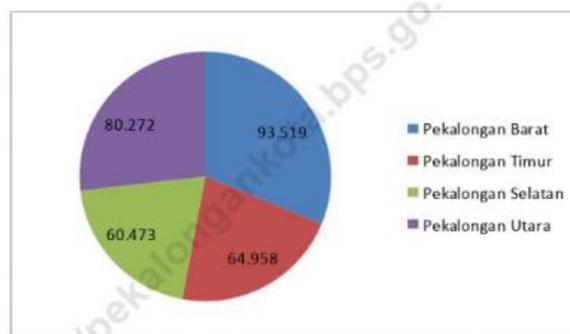
Terbitnya PP Nomer 21 Tahun 1988 tanggal 5 Desember 1988 dan ditinjaklanjuti dengan Inmendagri Nomor 3 Tahun 1989 merubah batas wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan sehingga luas wilayahnya berubah dari 1.755 Ha menjadi 4.465,24 Ha dan terdiri dari 4 Kecamatan, 22 desa dan 24 kelurahan.

Sejalan dengan era reformasi yang menuntut adanya reformasi disegala bidang, diterbitkan PP Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomer 32 Tahun 2004 yang mengubah sebutan Kotamadya Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan.

Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Pekalongan berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan tahun 2018 sebanyak 301.870 jiwa , terdiri dari 150.887 laki-laki (49,98%) dan 150.983 perempuan (50,02%).

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekalongan Tahun 2017
Population by Subdistrict in Pekalongan Municipality, 2017



Gambar 2.3. Jumlah penduduk Kota Pekalongan

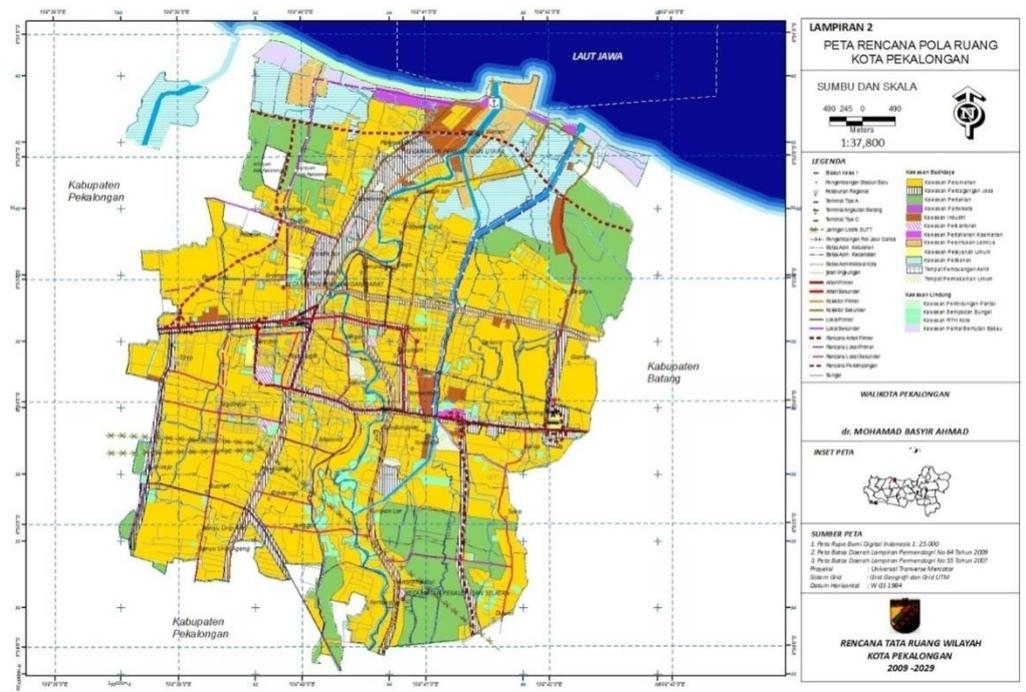
Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60° 50' 42" - 60° 55' 44" Lintang Selatan dan 109° 37' 55" - 109° 42' 19" Bujur Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Sebagai daerah yang telah berkembang dan produk domestik regional bruto tahun 2016 terbesarnya disumbangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (21,72%), Industri Pengolahan (21,43%), dan Konstruksi (14,36%) serta posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa maka tentunya Kota Pekalongan memiliki keunggulan

komparatif (comparative advantage) dibandingkan daerah lainnya. Diharapkan keunggulan ini dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 2.4. Peta Kota Pekalongan

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km². Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan \pm 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur \pm 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada

mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 14,88 Km² atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas (%)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,5	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,52	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	10,80	24
4	Kecamatan Pekalongan Utara	14,88	33
	TOTAL	45,25	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 2.6. Luas Per Kecamatan Kota Pekalongan